



ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2022

Utari Dyah Renaning Ruum^{1*}, Rahmania Nur Chasanah²

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115, Indonesia

²Statistika, Politeknik Statistika STIS, Jl. Otto Iskandardinata No.64C, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13330, Indonesia

*utari.dyah.renaning-2019@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Perceraian seringkali dianggap sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga menjadi salah satu aspek yang terdampak akibat adanya perceraian. Kota Surabaya merupakan kota dengan angka kasus perceraian tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perceraian di Kota Surabaya dan faktor pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah kasus perceraian, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, indeks IPG, dan indeks IDG Kota Surabaya di tahun 2018-2022. Data diperoleh dari website Badan Pusat Statistik dan Pengadilan Agama Kota Surabaya. Tingkat perceraian dianalisis menggunakan perhitungan angka perceraian kasar, angka perceraian umum, dan modified crude divorce rate. Faktor pengaruh tingkat perceraian dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman meliputi tingkat pendidikan, kualitas hidup perempuan, dan partisipasi perempuan di ranah publik. D Kasus cerai gugat merupakan kasus perceraian yang dominan di Kota Surabaya dengan persentase 70,2% kasus. Penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan terus menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Hubungan tingkat pendidikan dengan angka perceraian menunjukkan korelasi yang kuat dengan arah negatif. Pengaruh kualitas hidup perempuan menunjukkan korelasi yang lemah dengan arah positif terhadap angka perceraian. Partisipasi perempuan di ranah publik menunjukkan korelasi yang cukup kuat dengan arah yang positif terhadap angka perceraian.

Kata kunci: ketahanan keluarga; kota Surabaya; tingkat perceraian

ANALYSIS OF THE LEVEL OF DIVORCE IN SURABAYA CITY IN 2018-2022

ABSTRACT

Divorce is often seen as the last solution to a problem in the household. Family resilience is one thing that is affected by divorce. The city of Surabaya has the third highest divorce rate in Indonesia in 2021. This study aims to analyze the divorce rate in Surabaya and its causes. This study uses secondary data including the number of divorces, the education level of the head of the household, gender development index, and gender empowerment index of Surabaya City in 2018-2022. Data obtained from the website of the Central Bureau of Statistics and religious court of Surabaya. The divorce rate was analyzed using the calculation of crude divorce rate, general divorce rate, and modified crude divorce rate. Factors influencing divorce were analyzed using Spearman correlation test including education level, women's quality of life, and women's participation in the public sphere. Contested divorce are the dominant case in divorce in Surabaya with a percentage of 70.2% of cases. The highest causes of divorce are continuous disputes, economy, and leaving one of the parties. The relationship between education level and divorce rate shows strong correlation in a negative direction. The influence of women's quality of life shows weak correlation in a positive direction to the divorce rate. Women's participation in the public sphere shows a fairly strong correlation with a positive direction towards the divorce rate.

Keywords: divorce rate; family resilience; surabaya city

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan yang menjadi tujuan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak bisa datang begitu saja dalam rumah tangga. Untuk dapat memperoleh kebahagiaan tersebut diperlukan upaya, dimana upaya ini tidaklah mudah dilakukan karena kehidupan membawa banyak kondisi yang dapat menguji keharmonisan rumah tangga. Konflik yang muncul bisa jadi tidak hanya karena satu kondisi saja, tetapi merupakan akumulasi berbagai masalah yang tidak terselesaikan selama berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Ketika masalah sudah semakin runyam dan dirasa tidak bisa diselesaikan, seringkali jalan keluar terakhir yang diambil adalah dengan bercerai.

Peristiwa perceraian yang tinggi di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi tetapi mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan angka perceraian tertinggi di tahun 2021 adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan perceraian dapat dengan mudah dikabulkan. Pergeseran budaya yang semakin terbuka, berkurangnya makna dan nilai pernikahan, serta pemahaman agama yang kurang baik menjadi salah satu pemicu atau pendorong meningkatnya prevalensi perceraian di Indonesia (Kustini, 2016). Sepanjang tahun 2010-2015 telah terjadi peningkatan angka perceraian di Indonesia sebesar 15-20 persen (Choiriah, 2016). Data lain menunjukkan bahwa pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup), dengan jumlah sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga. Perkembangan zaman globalisasi membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam berbagai bidang sosial masyarakat. Perceraian dapat menjadi salah satu dampak negatif dari perubahan tersebut disebabkan oleh merosotnya nilai-nilai normatif dalam masyarakat (Dewi & Utami, 2015).

Adanya perubahan dalam peningkatan angka perceraian dikaitkan dengan perubahan peningkatan pendidikan, perubahan partisipasi angkatan kerja perempuan, perubahan sifat dalam seleksi pasangan, perubahan usia saat pernikahan, tingkat dukungan sosial bagi perempuan yang dicerai, perubahan dalam agama, dan hukum sipil yang mengatur perceraian serta perubahan harapan hidup (Dommaraju & Jones, 2011). Kasus perceraian menjadi salah satu perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur karena adanya dampak berkelanjutan bagi aspek ketahanan keluarga yang disebabkan oleh perceraian. Perceraian dapat menimbulkan kekacauan jiwa. Peran keluarga yang dijalankan dan dibebankan kepada satu orang saja akan menjadi jauh lebih sulit jika dibandingkan oleh dua orang. Beban yang diderita menjadi lebih berat dan persoalan bermunculan karena semuanya ditangani seorang diri (Humairah, 2016). Dampak yang muncul akibat perceraian meliputi stress, tekanan, kecemasan, trauma, pengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental, dan masih banyak lagi. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh semua anggota dalam rumah tangga, baik suami, istri, maupun anak. Akibatnya, tercipta perasaan yang tidak menentu di antara anggota keluarga, ayah dan ibu menjadi tidak berperan efektif sebagai orang tua dan tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak (Dagun, 2002).

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai

kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger & McCaston, 1998). Keutuhan keluarga merupakan salah satu dimensi dalam terciptanya ketahanan keluarga yang dinilai dengan tidak adanya perpisahan antara semua anggota keluarga atau semua anggota keluarga tinggal serumah. Ketahanan keluarga yang kuat merupakan pondasi bagi kesehatan mental dan kepercayaan diri seluruh anggota keluarga. Dengan hubungan baik antar anggota keluarga yang diciptakan melalui momen kebersamaan, dapat menciptakan ketahanan keluarga. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perceraian dan menganalisis faktor penyebab tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2018-2022 di Kota Surabaya.

METODE

Lokasi penelitian ini adalah Kota Surabaya karena kota ini menempati urutan ketiga angka perceraian tertinggi di Indonesia tahun 2022 setelah Indramayu dan Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi data sekunder berupa jumlah kasus perceraian, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, IPG, dan IDG Kota Surabaya di tahun 2018-2022. Data diperoleh dari website Badan Pusat Statistik dan Pengadilan Agama Kota Surabaya. Analisis tingkat perceraian pada penelitian ini menggunakan perhitungan angka perceraian kasar, angka perceraian umum, dan Modified Crude Divorce Rate (MCDR). Sedangkan analisis hubungan faktor penyebab perceraian dengan tingkat perceraian menggunakan teknik analisis korelasi Spearman.

HASIL

Tabel 1.

Kasus perceraian di Kota Surabaya pada tahun 2018-2022 berdasarkan jenis cerai

Tahun	Gugat	Talak	Jumlah
2018	3.785	1.655	5.440
2019	4.212	1.799	6.011
2020	3.516	1.638	5.154
2021	4.075	1.651	5.726
2022	4.171	1.631	5.802

Kasus tertinggi tercatat pada tahun 2019 dan kasus terendah tercatat pada tahun 2020. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh adanya pandemi di tahun 2020 sehingga mengakibatkan rendahnya kejadian perceraian atau rendahnya pengajuan kasus cerai ke pengadilan.

Angka perceraian kasar adalah persentase yang menunjukkan penduduk berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perceraian kasar merupakan perhitungan paling sederhana karena tanpa ada keterangan rinci tentang usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Angka perceraian umum adalah proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perhitungan ini lebih cermat karena menggunakan jumlah penduduk berusia lebih dari 15 tahun sebagai pembagi, dimana pada usia tersebut lebih memungkinkan untuk terjadinya perceraian. MCDR (*Modified Crude Divorce Rate*) atau modifikasi tingkat perceraian adalah tingkat untuk menunjukkan perceraian berdasarkan jumlah pasangan yang menikah. Tingkat perceraian ini lebih tepat karena penduduk yang menikah adalah yang lebih besar beresiko mengalami perceraian.

Tabel 2.
 Angka Perceraian per tahun

Tahun	Angka Perceraian Kasar	Angka Perceraian Umum	<i>Modified Crude Divorce Rate</i>
2018	1,88	2,39	291,75
2019	2,07	2,63	325,74
2020	1,78	2,67	305,82
2021	1,99	3,03	341,34
2022	2,00	2,67	350,02

Tabel 3.
 Data faktor penyebab perceraian diperoleh dari Pengadilan Agama

Faktor	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Zina	10	1	0	0	0	11
Mabuk	27	0	0	1	0	28
Madat	4	11	1	2	0	18
Judi	14	19	13	18	1	65
Meninggalkan salah satu pihak	521	395	223	137	33	1309
Dihukum penjara	5	15	28	29	2	79
Poligami	22	1	4	2	10	39
Kekerasan dalam rumah tangga	133	117	36	6	0	292
Cacat badan	229	1	1	0	0	231
Perselisihan terus menerus	2663	3266	3337	3555	3668	16489
Kawin paksa	0	2	1	1	0	4
Murtad	37	39	104	37	27	244
Ekonomi	1570	1984	1729	1868	1975	9126
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5235	5851	5477	5656	5716	

Tabel 3 faktor penyebab tersebut ditentukan oleh hakim setelah putusan persidangan perceraian dilakukan. Dari 14 penyebab terjadinya perceraian, angka tertinggi selama kurun waktu 2018-2022 ditunjukkan oleh faktor perselisihan terus menerus dengan jumlah total 16.489 kasus. Faktor tertinggi kedua adalah faktor ekonomi dengan jumlah total 9.126 kasus. Faktor tertinggi ketiga adalah faktor meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah total 1.309 kasus. Dari 14 faktor penyebab perceraian yang paling banyak diputuskan oleh hakim adalah faktor perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Tingkat pendidikan, kualitas hidup, dan aktivitas perempuan di ranah publik digunakan sebagai indikator penyebab perceraian akibat faktor ekonomi di Kota Surabaya.

Tabel 4.
 Persentase tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Surabaya pada tahun 2018 hingga 2022.

Tahun	Persentase Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga	
	<SD	>SMP
2018	6,02%	3,26%
2019	4,73%	2,40%
2020	4,81%	3,01%
2021	3,34%	2,90%
2022	3,03%	3,14%

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kurang dari SD selalu menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya selama 2018-2021. Sedangkan di tahun 2022 kepala keluarga dengan pendidikan lebih dari SMP menunjukkan persentase lebih tinggi daripada jenjang pendidikan di bawahnya.

Tabel 5.
Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya tahun 2018 hingga 2022.

Tahun	Indeks Pembangunan Gender
2018	93,66
2019	93,57
2020	93,60
2021	93,58
2022	93,90

Tabel 5 menunjukkan kualitas hidup perempuan yang dinilai dengan indeks pembangunan gender dan menunjukkan fluktuasi dengan perubahan nilai yang tidak signifikan dan nilai paling baik ditunjukkan pada tahun 2022.

Tabel 6.
Nilai IDG di Kota Surabaya pada tahun 2018 hingga 2022.

Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender
2018	82,89
2019	83,29
2020	83,88
2021	82,86
2022	82,82

Tabel 6 menunjukkan partisipasi perempuan dalam ranah publik yang dapat dinilai dengan indeks pemberdayaan gender. Nilai IDG menunjukkan kenaikan di tahun 2019 dan 2020 tetapi justru menunjukkan penurunan di tahun 2021 dan 2022.

PEMBAHASAN

Tingkat perceraian

Kasus perceraian di Kota Surabaya pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan dan peningkatan jumlah kasus. Berdasarkan jumlah dari jangka waktu lima tahun tersebut didapatkan jumlah perceraian di Kota Surabaya didominasi oleh kasus cerai gugat, yaitu sebesar 70,2% dari total kasus perceraian yang terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa saat ini perempuan lebih berani untuk mengambil keputusan untuk keluarganya, termasuk dalam hal perceraian.

Faktor tingkat perceraian

Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat mengubah cara dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan lebih kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi jenis pekerjaan yang didapatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kedudukan dan jabatan yang kemudian juga akan berpengaruh terhadap tingkat ekonominya. Perempuan yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dibanding pasangannya berpotensi lebih besar untuk bercerai. Pendidikan menentukan keberhasilan seseorang dalam bidang ekonomi, yang juga berperan dalam mewujudkan keberhasilan dalam rumah tangga, karena keluarga tidak akan terlepas dari kebutuhan ekonomi. Pendidikan rendah mengakibatkan sulitnya seseorang dalam merebut peluang untuk mendapat pekerjaan yang layak (Kusuma, 2013). Berdasarkan uji korelasi, didapatkan nilai hubungan yang tinggi dengan

nilai negatif antara tingkat perceraian dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dimana semakin banyak kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah atau terbatas pada sekolah dasar, semakin tinggi tingkat perceraian di Kota Surabaya. Sebaliknya, semakin banyak kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi atau riwayat pendidikan paling rendah adalah SMP, semakin rendah tingkat perceraian.

Kualitas hidup perempuan

Kualitas hidup perempuan dapat digambarkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dimana indeks ini menunjukkan besaran partisipasi perempuan dalam pembangunan. Apabila kualitas hidup perempuan dalam pembangunan makin setara dengan laki-laki maka nilainya akan makin mendekati angka 100. Berdasarkan uji korelasi, didapatkan nilai hubungan yang lemah dengan nilai positif antara tingkat perceraian dengan Indeks Pembangunan Gender di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai IPG tidak mempengaruhi tingkat perceraian secara signifikan di Kota Surabaya.

Partisipasi perempuan dalam ranah publik

Keaktifan perempuan dalam dunia kerja dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Komponen pembentuk dengan posisi tertinggi dalam perhitungan IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga profesional, sumbangan pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan di parlemen. Makin besar komponen tersebut maka nilai IDG akan semakin mendekati 100. Berdasarkan uji korelasi, didapatkan nilai hubungan moderat dengan nilai positif antara tingkat perceraian dengan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik memberikan pengaruh cukup kuat dalam peningkatan kasus perceraian di Surabaya, dimana semakin tinggi angka partisipasi perempuan di ranah publik maka semakin tinggi pula angka perceraian.

SIMPULAN

Peran pendidikan sangat penting terhadap cara berpikir dan kemampuan penyelesaian masalah seseorang, termasuk dalam kehidupan perkawinan. Dengan bekal pengetahuan yang baik tentang penyelesaian masalah rumah tangga, ketahanan keluarga dapat dicapai sehingga kualitas keluarga menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriah, M. (2016, 09 20). Indonesia Darurat Perceraian. Diambil kembali dari Merdeka: <https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>
- Dagun, S. M. (2002). Psikologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, P. S., & Utami, M. S. (2015). Subjective Well-Being Anak dari Orang Tua yang Bercerai. *Jurnal Psikologi*, 35 (2), 194-212. doi:10.22146/jpsi.7952
- Dommaraju, P., & Jones, G. (2011). Divorce Trends in Asia. *Journal of Social Science*, 39(6), 725-750. doi:10.1163/156853111X619201
- Frankenberger, T. R., & McCaston, M. K. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture (FAO) Alimentation*, 30-35.
- Humairah, R. (2016). Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi

Deskriptif Analitis di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Kustini, I. R. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Kusuma, E. A. (2013). *Analisis Tingkat Perceraian di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sari, N. A., Julia, A., & Rahmi, D. (2020). Pengaruh Kualitas Hidup, Aktivitas di Ranah Publik, serta Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 16-22. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.19724>

Tanziha, I., Utomo, H., Utami, A., Arifin, J., Anggraini, S., Nurhayati, & Bodromurti, W. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

